

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

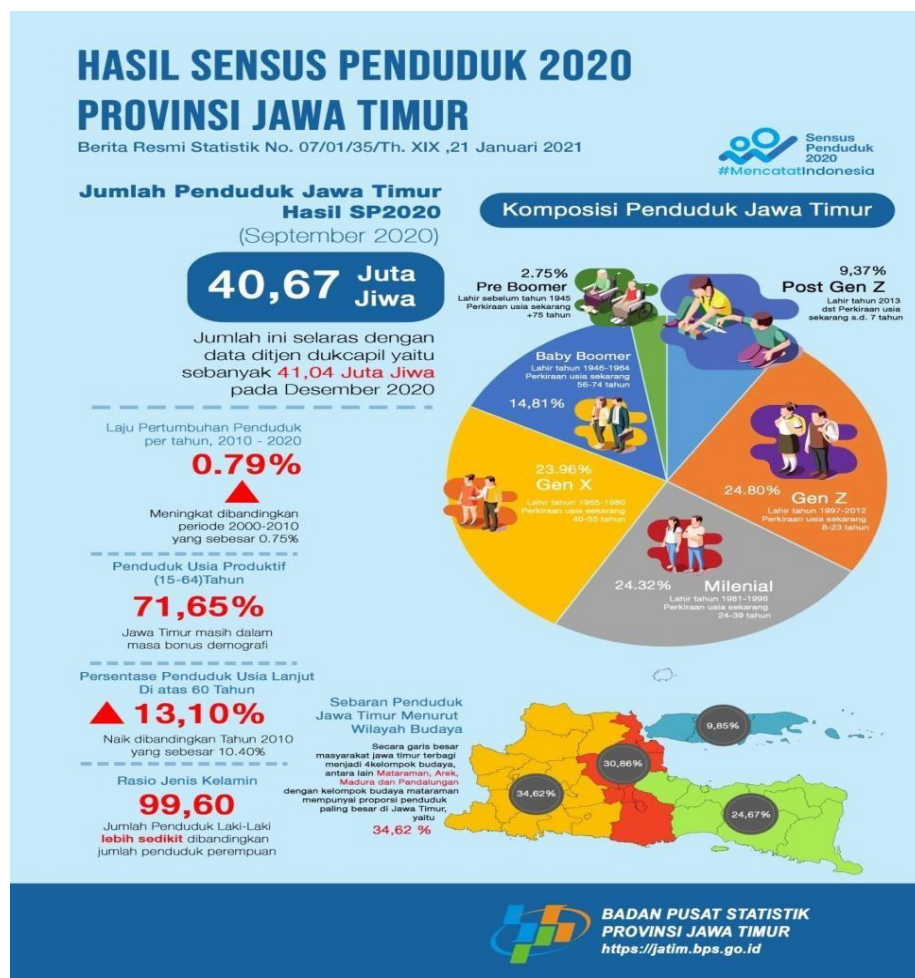
### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang yang berusaha untuk mewujudkan impian menjadi negara maju. Pada era globalisasi saat ini, pelayanan informasi yang efektif, efisien, serta akurat sangatlah dibutuhkan. Karena pada saat ini masyarakat cenderung membutuhkan informasi yang dimana waktu bukan penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang di inginkan. Hal tersebut memberikan manfaat untuk masyarakat, agar masyarakat tidak tertinggal dalam informasi terbaru yang dibutuhkannya. Peningkatan arus perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan menimbulkan permasalahan baru, seperti adanya permasalahan sampah, transportasi, sosial ekonomi, bencana, kesehatan dan terbatasnya sumber daya alam menjadikan pengelolaan kota menjadi lebih terbatas. Dikutip dari (Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2017) tren urbanisasi ini akan terus berlanjut dan diperkirakan pada tahun 2050 populasi urban akan mencapai angka 66% dari seluruh populasi dunia. Di Indonesia sendiri populasi urban telah mencapai 53.3% di tahun 2015 (BPS RI) dan berdasarkan penelitian oleh Citiasia Center for Smartnation (CCSN) jumlah ini akan meningkat menjadi 68% di tahun 2035.

Dengan adanya kondisi tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut, serta

mencari solusi untuk meminimalisir terjadinya kendala atau permasalahan tersebut. Kota-kota besar di dunia, telah mendorong peran aktif dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota, hal tersebut menjadi interaksi positif antara penyedia layanan dan masyarakat (Pemerintah Daerah dengan Masyarakat).

Gambar 1.1 Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Timur, Tahun 2020.

Diakses pada 26 Januari 2021

Dilihat dari data gambar diatas, Sensus Penduduk 2020 mencatat penduduk Jawa Timur pada bulan September 2020 sebesar 40,67 juta orang. Dibandingkan dengan sensus sebelumnya, jumlah penduduk Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun yaitu tahun 2010

hingga 2020, jumlah penduduk Jawa Timur mengalami penambahan sekitar 3,19 juta jiwa atau rata-rata 0,32 juta jiwa setiap tahun. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur sebesar 0,79 persen per tahun. Terdapat pengurangan laju pertumbuhan penduduk hampir dua setengah persen jika dibandingkan dengan periode 1971-1980 yang sebesar 3,28 persen. Akan tetapi mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2000-2010.

Kota Kediri adalah salah satu kota di Jawa Timur yang merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai industri terbesar seperti PT. Gudang Garam Tbk, kain tenun dan industri gula. Kota Kediri juga memiliki banyak makanan khas seperti pecel tumpang, lalu gethuk pisang, tahu tahwa, nasi goreng arang, sate emprit, cenil, dan sebagainya. Lalu Kota Kediri juga memiliki budaya serta wisata alam atau buatan, budaya tradisioanal Kota Kediri seperti jaranan lalu untuk Pariwisatanya, seperti Gunung Klotok, Museum Airlangga, Candi Surowono, Museum Fotografi, Gunung Maskumambang, Goa Selomangleng, Taman Ngronggo, Taman Sekartaji, Taman Hutan Joyoboyo, Taman Brantas, Kediri Memorial Park dan lainnya. Dengan adanya potensi pariwisata di Kota Kediri, hal tersebut bisa jadi sumber pendapatan atau mata pencaharian masyarakat dengan menjual produk olahan atau produk lokal masyarakat serta kuliner khas Kota Kediri.

Seiring adanya perkembangan teknologi pada era globalisasi saat ini, masyarakat menjadi semakin modern dan memiliki segudang ekspektasi serta tuntutan dalam hal lingkungan yang bersih, pekerjaan yang nyaman, adanya sarana / prasarana untuk publik yang memadai, dan kemudahan dalam hal

mengurus segala bentuk pelayanan publik. Dikutip dari situs resmi (*kedirikota.go.id*, 2019) Kota Kediri terpilih dalam *Memory of Understanding* (MoU) dalam kesepakatan tentang program *Smart City*, pemerintah Kota Kediri menekan nota kesepakatan atau MoU bersama Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang implementasi gerakan menuju 100 *Smart City* pada tanggal 16 Mei 2019. Oleh karena itu, pemerintah Kota Kediri membuat kebijakan atau peraturan daerah, terkait dengan perencanaan pembangunan, yaitu (Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019) tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Kediri Tahun 2019-2039. Peraturan tersebut berguna sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kota Kediri khususnya dalam bidang industri, dengan menggunakan konsep *Smart City*. Hal tersebut ditekankan pada visi misi dari RPIK / Peraturan Daerah tersebut yakni “Terwujudnya Kota Kediri sebagai *Industrial Smart City*”. Hal tersebut juga searah dengan tujuan salah satu indikator *Smart City* yaitu *Smart Economy* yang diberlakukan Kota Kediri antara lain meningkatnya ekonomi kreatif dan menciptakan ekosistem industri berdaya saing yang memanfaatkan produk-produk unggulan daerah.

Sejalan dengan salah satu fokus kerja Kabinet Indonesia Maju untuk Pemberdayaan UMKM, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya memacu pertumbuhan wirausaha industri baru khususnya di sektor industri kecil dan menengah (IKM) (*Kemenperin.go.id*, 2019).

“IKM berperan penting menjadi tulang punggung perekonomian nasional, bahkan mereka mampu berdiri tegak ketika kondisi ekonomi global sedang tidak stabil,” kata Direktur Jendral Industri Kecil, Menengah dan Aneka

(IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih, Jakarta (27/10/2019)”  
(*Kemenperin.go.id*, 2019) diakses pada tanggal 13 maret 2021.

Pada (Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019) Tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Kediri Tahun 2019-2039, pasal 4 tentang sistematik RPIK pada Bab II, bagian D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, menjelaskan bahwa Kota Kediri berupaya untuk meningkatkan peran sektor industri, terutama Industri Kecil Menengah (IKM). Berkaitan dengan pengembangan IKM unggulan, kajian RPIP telah menetapkan jenis IKM unggulan untuk Kota Kediri, yaitu (i) Industri Tekstil, Pakaian Jadi, Kulit dan Alas Kaki, dengan komoditi unggulannya adalah tenun ikat dan batik tulis, serta (ii) Industri Makanan, dengan komoditi makanan olahan seperti koyah, opik gambir dan kue kering. Artinya, produk dari kedua industri ini mendapatkan prioritas pendanaan dibandingkan produk industri lainnya.

Konsep *Smart City* merupakan suatu terobosan atau langkah dalam hal memajukan kota di suatu negara, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut (Sa'diyah et al., 2020) *Smart City* merupakan suatu konsep mengenai tata suatu kota dalam mengoptimalkan teknologi informasi dan digital untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, serta meningkatkan layanan pemerintah sehingga dapat menekan dan mengurangi biaya, waktu, serta tenaga. Sedangkan menurut (Kynanthy et al., 2019) *Smart City* adalah konsep kota inovatif yang memanfaatkan teknologi, komunikasi serta teknologi lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi dari pelaksanaan dan pelayanan kota, dan meningkatkan kompetitif suatu kota serta mampu mendukung kebutuhan generasi saat ini maupun masa mendatang

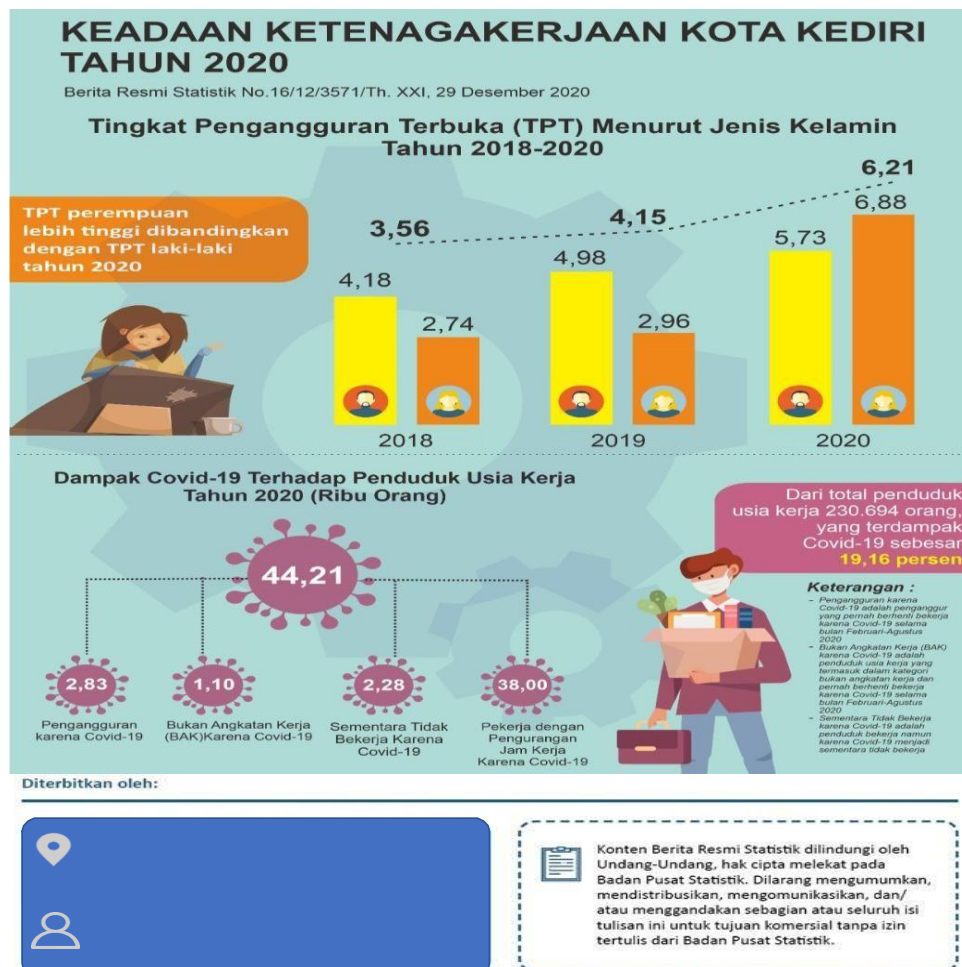
dengan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Eniyati (2017) dikutip dari (Sa'diyah et al., 2020) hal ini sejalan dengan berbagai pengertian tentang *Smart City* yang menegaskan bahwa *Smart City* merupakan upaya untuk membahagiakan warganya. Menurut Lombardi (2012) dikutip dari (Alkaf & Sutrisno, 2019) konsep kota cerdas kemudian diidentifikasi ke dalam 6 dimensi, yaitu 1) *Smart Mobility*, 2) *Smart Environment*, 3) *Smart People*, 4) *Smart Living*, 5) *Smart Economy*, Dan 6) *Smart Governance*. Konsep *Smart City* sudah banyak diterapkan di kota-kota di dunia, seperti Amsterdam, Barcelona, Tokyo dan kota lainnya. Termasuk juga kota-kota di negara Indonesia, konsep tersebut sudah diterapkan di kota Surabaya, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Jakarta, dan lainnya sebagainya. *Smart City* bertujuan untuk menciptakan kemandirian daerah dan meningkatkan layanan publik, mencakup berbagai bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, pariwisata, pemerintahan, ekonomi dan lainnya (Pratama, 2014:94). Selaras dengan pernyataan tersebut, tujuan Kota Kediri menyusun *masterplan smart city* adalah untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Kediri, ekonomi masyarakat Kota Kediri, keberlangsungan lingkungan hidup.

Akan tetapi di awal tahun 2020 muncul permasalahan baru tepatnya bulan januari, seluruh dunia mendapatkan dampak krisis ekonomi yang disebabkan oleh suatu virus. Penyebarannya virus sangat cepat dan sehingga setiap negara berusaha untuk meminimalisir penyebaran dari virus tersebut meskipun dengan jangka waktu yang terbilang cepat. Virus tersebut adalah *Coronavirus Disease* atau disingkat *Covid-19*, penyakit ini adalah virus baru yang belum teridentifikasi sebelumnya pada manusia yang menyebabkan

penyakit saluran pernapasan seperti flu dengan gejala seperti batuk, demam, dan pada kasus yang lebih parah, *pneumonia*. Penyebab utama *coronavirus* baru ini adalah melalui kontak dengan orang yang terinfeksi saat mereka batuk atau bersin, atau melalui tetesan air liur atau cairan hidung.

Munculnya wabah tersebut, juga berdampak pada perekonomian Kota Kediri, dan membuat pemerintah memberlakukan WFH (*Work From Home*) dan meliburkan seluruh kegiatan belajar mengajar. Beberapa daerah di Indonesia memberlakukan *Lockdown*, seperti Jakarta, Surabaya yang pernah memberlakukan sistem tersebut. Hal tersebut juga memutus akses untuk ke wilayah tersebut, sehingga dapat mengakibatkan penurunan pendapatan ekonomi di daerah tersebut. Banyak permasalahan yang harus di selesaikan pemerintah di masa pandemi *Covid-19* mulai dari permasalahan ekonomi, kesehatan dan lainnya. Kota Kediri juga sempat menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), lalu beradaptasi ke era *New Normal*, akan tetapi adanya peningkatan lagi terkait masyarakat yang terkena *Covid-19* di Kota Kediri dan sehingga pemerintah menerapkan PPKM (Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat). Kasus positif bertambah 8 (941), kasus aktif 3 (798), kasus sembuh bertambah 5 dengan tingkat kematian 9,56% dan tingkat kesembuhan 84,80%, update tanggal 24 Januari 2021 di kutip dari web ([corana.kedirikota.go.id](http://corana.kedirikota.go.id), 2021). Karena adanya *Covid-19* tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan masyarakat, akan tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi masyarakat serta dan sektor-sektor industri yang mengakibatkan adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Hal tersebut dapat dilihat dari Gambar Keadaan Ketenagakerjaan Kota Kediri pada tahun 2020 .

Gambar 1.2 Keadaan Ketenagakerjaan Kota Kediri Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, Tahun 2020.

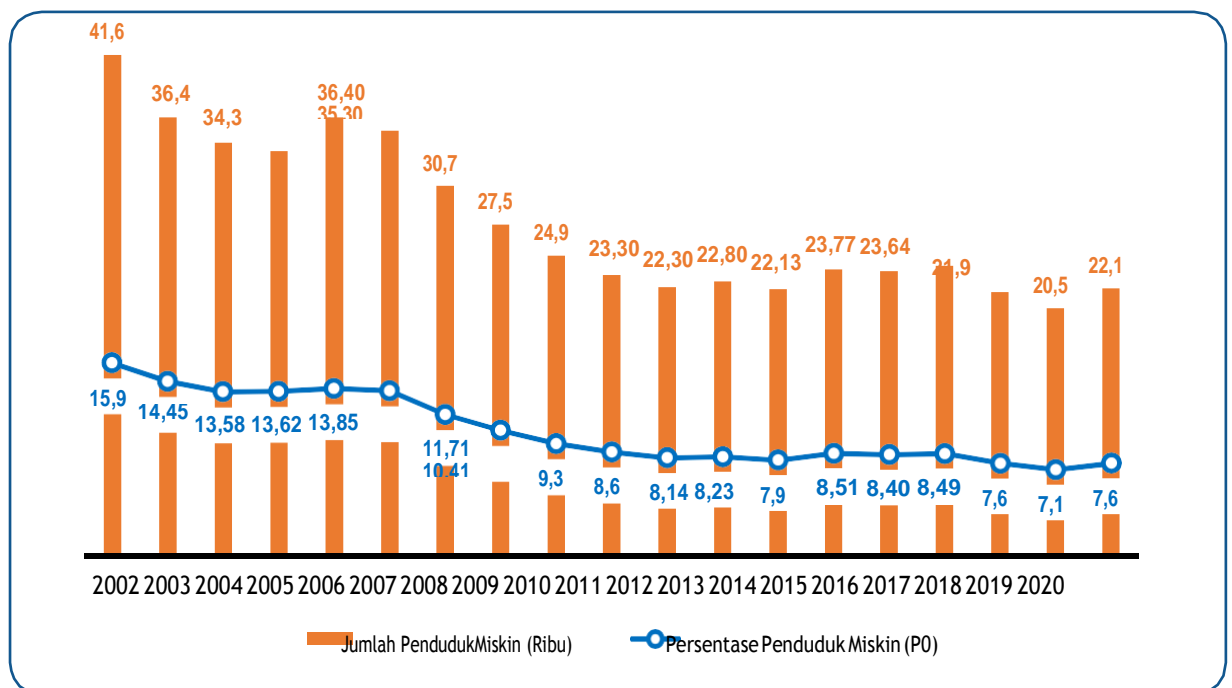
Diakses pada 26 Januari 2021

Dilihat dari gambar diatas yang dikutip dari web ([kedirikota.bps.go.id](http://kedirikota.bps.go.id), 2020), tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2020 sebesar 6,21 persen, naik 2,73 persen poin dibandingkan dengan tahun 2019, dan penduduk yang bekerja tahun 2020 sejumlah 142.804 orang, turun sejumlah 682 orang dari tahun 2019. Lapangan/bidang pekerjaan yang mengalami kenaikan terbesar adalah Sektor Jasa 4,08 persen poin, sedangkan sektor yang mengalami penurunan terbesar adalah Manufaktur sebesar -4,81 persen poin. Serta Terdapat 44.206 penduduk usia kerja (19,16 persen) yang terdampak *Covid-19*, terdiri dari pengangguran



karena *Covid-19* sebanyak 2.830 orang, pekerja yang sementara tidak bekerja 2.275 orang, penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja 44.206 orang, dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena *Covid-19* sebanyak 1.100 orang. Beberapa masyarakat yang kehilangan pekerjaan yang diakibatkan adanya *Covid-19*, mengakibatkan harga barang tahun 2020 meningkat. Peningkatan harga barang terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (*kedirikota.bps.go.id*, 2020).

### 1.3 Gambar Grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin



Sumber : BPS, Susenas 2002-2020. Diakses Pada 26 Januari 2021

Angka kemiskinan masyarakat Kota Kediri pada tahun 2019 di bandingkan dengan tahun 2020. oleh karena itu penerapan konsep *Smart City* perlu adanya inovasi-inovasi terbaru atau pengembangan inovasi yang berguna dalam penyelesaian masalah seperti meminimalisir tingkat kemiskinan dan pengangguran Kota Kediri serta permasalahan lainnya.

Menurut (Anggara, 2012:539) Implementasi atau pelaksanaan kebijakan merupakan konsekuensi logis dari tuntutan akan kebijakan dan tuntutan janji bukan sekedar tuntutan akan eksistensi atau ditentukannya kebijakan, melainkan sampai dilaksanakannya kebijakan tersebut. Jika dilihat juga dari penelitian (Limantara et al., 2020) yang berjudul “Penguasaan Teknologi dalam Kesiapan Kota Kediri Menuju Kota Cerdas” (Jurnal) menyimpulkan bahwasanya pemerintah kota Kediri harus lebih gencar dalam menginformasikan aplikasi-aplikasi pelayanan yang sudah ada kepada masyarakat dan kepada pelaku usaha perlu lebih diperkenalkan dengan aplikasi-aplikasi yang bisa diintegrasikan dengan aplikasi yang ada disisi pelaku usaha. Memperbanyak edukasi dan pelatihan kepada Masyarakat agar lebih banyak penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari termasuk pada sektor industri/dunia usaha, sedangkan Pemerintah dan dunia usaha/industri perlu lebih untuk “meratakan” kesiapan teknologi pada sisi orgawarenya. Berdasarkan fenomena diatas mengenai Smart City dan permasalahan yang dihadapi di Kota Kediri, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Implementasi Smart Economy Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Menengah Kota Kediri Menuju Smart City”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana Implementasi *Smart Economy* Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Menengah Kota Kediri Menuju *Smart City*”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi *Smart Economy* Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Menengah Kota Kediri Menuju *Smart City*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti dapat mengetahui tentang Implementasi *Smart Economy* Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Menengah Kota Kediri Menuju *Smart City* dan bagi yang akan membuat laporan penelitian akan menambah referensi serta menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang materi perkuliahan khususnya Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Publik.

#### 2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Sebagai bahan referensi yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh peneliti lainnya yang ingin mengembangkan kajian serupa di masa yang akan datang, serta untuk menambahkan referensi perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan menambahkan referensi khususnya Ruang Baca (Perpustakaan) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

#### 3. Bagi Pemerintah Kota Kediri

Diharapkan dapat memberikan masukan dan saran, serta dapat membantu dalam meningkatkan inovasi-inovasi yang berguna untuk mengatasi masalah perekonomian di Kota Kediri, khususnya dalam pemberdayaan industri kecil menengah.